



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2019

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGGAI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2019 dapat selesai disusun tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Ketahanan Pangan atas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2019.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dinas Ketahanan Pangan disusun dalam rangka untuk mengetahui realisasi pencapaian target kinerja OPD dan pencapaian target kinerja RPJMD, oleh karena itu dilakukan evaluasi dan disajikan dalam bentuk laporan LKPJ Kabupaten Banggai setiap tahunnya, dimana untuk saat ini merupakan laporan realisasi pencapaian tahun 2019.

Semoga laporan ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Banggai.

Luwuk, 13 Januari 2020

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Banggai



Rudi Purwana K. Bullah, S.Sos

Pembina Tingkat I

Nip. 19710601 199903 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan selama tahun 2019. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai mempunyai urusan Pemerintahan bidang Pangan sesuai Peraturan Daerah kabupaten Banggai nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), terdapat tiga tingkatan kelembagaan DKP yaitu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Di Kabupaten Banggai Dewan Ketahanan Pangan diketuai oleh Bupati Banggai, DKP kabupaten memiliki tugas (1) merumuskan kebijakan/program Bupati selaku ketua DKP Kabupaten dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi; (2) merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pangan; (3) melaksanakan evaluasi dan pengendalian program pembangunan pangan di Kabupaten.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan 2016-2021 mengacu pada Visi Kabupaten Banggai yaitu “ **Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian, dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya** “. Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan mengacu pada misi yang pertama yaitu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa dan misi yang ke dua yaitu mengembangkan Pertanian melalui pemanfaatan teknologi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan

antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Untuk mencapai kinerja tahun 2019, Dinas Ketahanan Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019.

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019 dari 2 indikator kinerja utama, satu indikator memperoleh capaian di atas 100% (Sangat Berhasil) dan satu indikator dengan capaian 55% (cukup berhasil).

Realisasi capaian terendah adalah indikator skor PPH Ketersediaan karena masih jauh di bawah target yang ditetapkan tahun 2019, yaitu target skor PPH Ketersediaan 90,1 realisasi 49,55, ini menggambarkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Banggai belum beragam, hal ini disebabkan karena masih rendahnya produksi komoditas pertanian yaitu umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan, kelompok bahan minyak dan lemak, buah dan biji berminyak juga komoditas pangan hewani, selain itu tidak tersedianya data ekspor impor, untuk itu perlunya koordinasi dengan lintas sektor terkait, seperti dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk peningkatan komoditas pertanian sebagai bahan pangan nabati, serta Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan agar komoditas peternakan dan komoditas perikanan yang merupakan bahan pangan hewani dapat ditingkatkan, sehingga ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Banggai dapat mencapai skor ideal 100. Selain itu peran Dewan Ketahanan Pangan juga harus ditingkatkan agar permasalahan-permasalahan pangan di Kabupaten Banggai dapat dicarikan solusi bersama demi tercapainya Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai yang mantap dan berkelanjutan.

Rendahnya skor PPH Ketersediaan bukan karena kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang belum optimal tetapi untuk meningkatkan skor PPH Ketersediaan diperlukan dukungan dan komitmen dari berbagai sektor dan instansi terkait sektor pangan, dukungan tersebut antara lain:

- 1) Peningkatan produksi tanaman khususnya tanaman pangan selain padi;
- 2) Peningkatan produksi komoditas hortikultura;
- 3) Peningkatan produksi komoditas pangan hewani;
- 4) koordinasi lintas sektor untuk persamaan

persepsi terkait data-dlam penyusunan NBM dan PPH Ketersediaan sehingga hasilnya lebih tepat dan akurat.

Pencapaian kinerja indikator skor PPH Konsumsi mencapai di atas 100%, dengan target skor PPH Konsumsi tahun 2019 adalah 76,8 dan realisasi 88,2, ini menunjukkan bahwa kuallitas konsumsi masyarakat semakin baik/semakin beragam.

Realisasi belanja Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 5.121.681.147; atau 86,87% dari pagu sebesar Rp. 5.896.015.888. Anggaran tersebut digunakan untuk mencapai dua target indikator kinerja utama dan dua target non indikator kinerja utama sebagai dukungan manajemen Dinas Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan di dalam renstra, dimana turunannya dibuat Renja dan Dokumen Anggaran sebagai target tahunan dari dinas masing-masing.

Secara umum indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan baik. Untuk itu upaya perbaikan kedepan yang dapat dilakukan adalah dengan mengintensifkan koordinasi serta mengkomunikasikan program dan kegiatan serta melakukan evaluasi setiap triwulan dengan seluruh pelaksana kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan. Selain itu juga dengan melaksanakan manajemen resiko, terutama untuk program kerja yang bersifat prioritas, sehingga resiko yang akan dihadapi dapat diproyeksi, dimitigasi yang akhirnya kesempatan pencapaian tujuan dan target kinerja menjadi lebih besar.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1-5
B. MAKSUD DAN TUJUAN	5
C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	6-9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGI	10-16
B. RENCANA KERJA TAHUN 2019	17-20
C. PERJANJIAN KINERJA	20-27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN	28-58
B. REALISASI ANGGARAN DINAS KETAHANAN PANGAN	59-69
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	70-71
B. PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT	72-74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021	15
Tabel 2.	Rencana Kerja Tahun 2019	17
Tabel 3.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 - 2021	21
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019	22
Tabel 5.	Program, Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Tahun 2019	23
Tabel 6.	Penjelasan Metode Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019	30
Tabel 7.	Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019	31
Tabel 8.	Capaian Realisasi Target Indikator Kinerja Program Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2019	34
Tabel 9.	Capaian Realisasi Target Indikator Kinerja Program Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2019	38
Tabel 10.	Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017 s.d Tahun 2019	44
Tabel 11.	Capaian Realisasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dengan Target Jangka Menengah sesuai RENSTRA Tahun 2016-2021	47
Tabel 12.	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kabupaten Banggai Tahun 2019	49
Tabel 13.	Angka Kecukupan Energi dan Protein Kabupaten Banggai Tahun 2019	50
Tabel 14.	Cadangan Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2019	51
Tabel 15.	Perbandingan Skor PPH Konsumsi Kabupaten Banggai Dengan Target Nasional	55
Tabel 16.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
Tabel 17.	Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2019	59
Tabel 18.	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai Tahun 2019	60
Tabel 19.	Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan Bidang Ketahanan	64
Tabel 20.	Perbandingan Antara Pencapaian Kinerja Utama Dengan Anggaran	69
Tabel 21.	Perbandingan Antara Pencapaian Kinerja (NonIKU) Dengan Anggaran	69

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambarl 1.	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan	9



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Good governance sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepadanya.

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan tahun 2016-2021. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan adalah dukungan manajemen dan teknis lainnya pada



Dinas Ketahanan Pangan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Pada dasarnya pelaksanaan tahun 2018 merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya yang bersifat pelayanan operasional kantor dan teknis lainnya. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan juga melaksanakan operasional Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

Dinas Ketahanan Pangan mengimplementasikan semangat reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan, melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu sistem manajemen pemerintahan yang fokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*output*). SAKIP diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah secara mandiri, yaitu mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan instrumen utama dalam melaksanakan pembaharuan birokrasi pemerintah, untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen yang kuat dari pejabat dan semua pegawai dilingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai.

Pelaksanaan penyusunan LkjiP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai tahun 2019 dilandasi oleh beberapa ketentuan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator kinerja Utama (IKU);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
14. Peraturan Bupati Banggai Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam pencapaian sasaran tahun 2019, terdapat beberapa kendala utama yaitu : (1) Rotasi pimpinan dan staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pegawai sering terjadi, yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi; (2) Perubahan kebijakan yang berdampak pada perubahan anggaran dan sasaran; (3) PPH Ketersediaan yang masih jauh dari target yang diharapkan; dan (5) Kurangnya SDM/Pegawai di Dinas Ketahanan Pangan baik kualitas maupun kuantitas khususnya fungsional yang menangani analisis pangan Tahun 2019.

Melihat permasalahan utama pada kegiatan dukungan manajemen ketahanan pangan di atas, Dinas Ketahanan Pangan sebagai pengelola manajemen pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Banggai, dituntut untuk mampu mewujudkan akuntabilitasnya dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga evaluasi program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Akuntabilitas dapat dilihat melalui kompetensi, sinergisitas, dan kinerja yang dihasilkan lembaga, serta adanya standar pelayanan minimal.



Sejalan dengan adanya perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didukung dengan penegakan hukum dan transparansi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengukuran kinerja dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai menyusun Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019, yang telah disesuaikan dengan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Permentan No 50 tahun 2016. Di samping itu Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance*, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) kepada Presiden. Dengan demikian maka penyusunan LkjIP ini dimaksud sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara periodik.

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai tahun 2019 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan selama 1 tahun kepada Pemerintah Kabupaten Banggai.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Sebagai media untuk melaporkan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan selama tahun 2019.
2. Sebagai alat kendali dan sarana untuk menilai kinerja Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai sasaran dan tujuannya sehingga dapat



mendorong terwujudnya good governance yang memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintah baik Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat.

C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pangan. Disamping itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, serta untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai dengan Keputusan Bupati Banggai Nomor 521/708/DKP tanggal 23 Maret 2018, Dinas Ketahanan Pangan secara *ex-officio* sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan memberikan pelayanan teknis dan administratif pada pelaksanaan Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan (DKP).

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang ketahanan pangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan fungsi tambahan yaitu pelaksanaan urusan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai.

2. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Sebagai unit kerja Eselon II, Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara operasional dilaksanakan oleh 4 Bidang, 1 Sekretariat, dan 15 Subbagian/Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

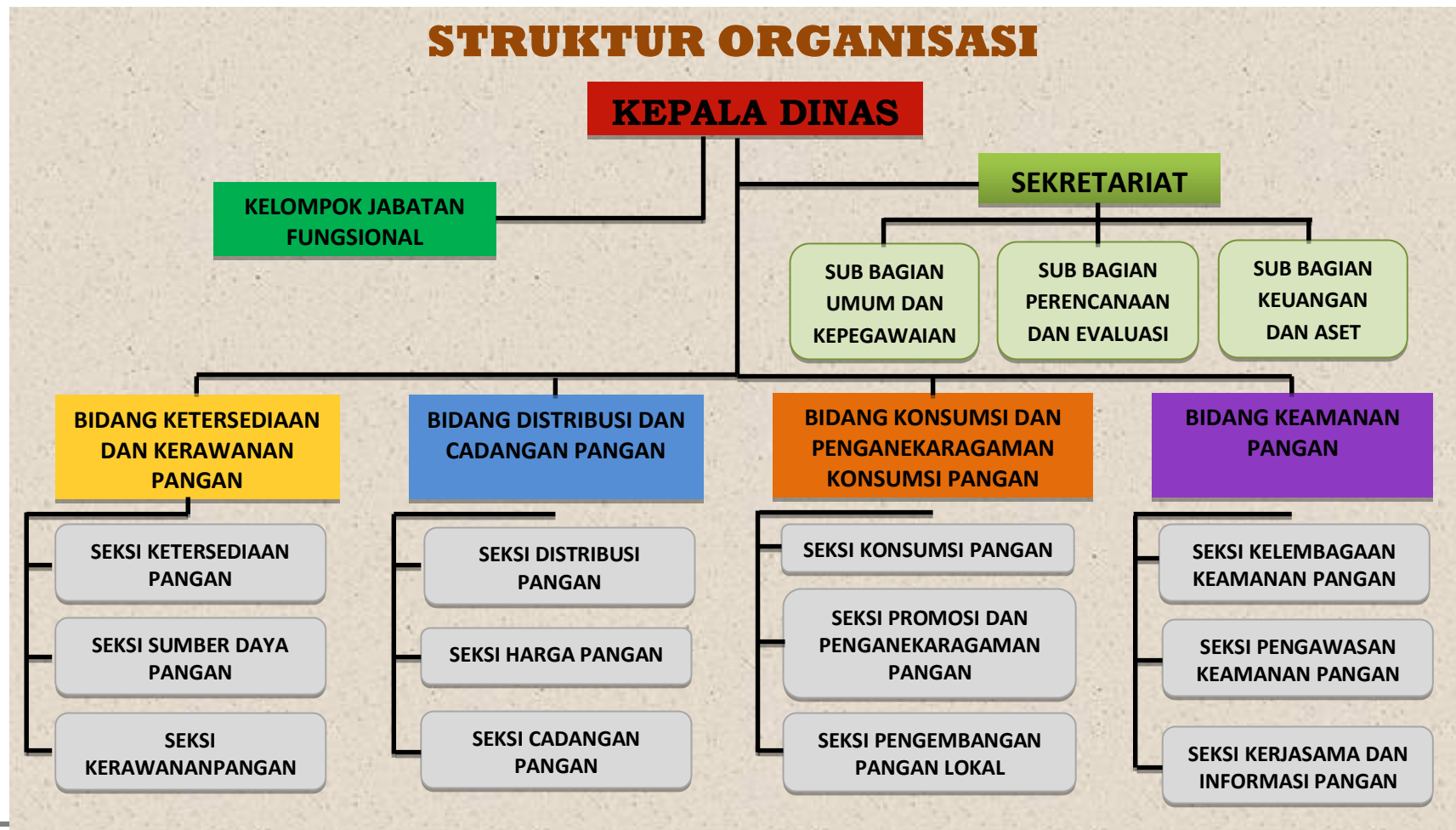
- a. **Kepala Dinas;**
- b. **Sekretariat**, dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan aset, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset berdasarkan ketentuan yang berlaku, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. **Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan operasional ketersediaan dan kerawanan pangan, meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas ketersediaan pangan, sumber daya pangan, dan kerawanan pangan, membawahi :
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
 3. Seksi Kerawanan Pangan.



-
- d. **Bidang distribusi dan Cadangan Pangan**, mempunyai tugas melaksanakan operasional distribusi dan cadangan pangan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan, membawahi :
1. Seksi Distribusi Pangan;
 2. Seksi Harga Pangan; dan
 3. Seksi Cadangan Pangan.
- e. **Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan**, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional konsumsi dan penganekaragaman konsumsi pangan, meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal, membawahi:
1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 3. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
- f. **Bidang Keamanan Pangan**, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional keamanan pangan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan serta kerjasama dan informasi keamanan pangan, membawahi :
1. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
 3. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
- g. **Kelompok Jabatan fungsional.**



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa Rencana Strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan instansi Pemerintah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan). Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai mencakup pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan cita yang ingin diwujudkan. Visi adalah suatu harapan dan tujuan yang akan dicapai, dalam mencapai visi tersebut memerlukan waktu yang panjang dan kerja keras, karena akan berkembang sesuai dengan kondisi pembangunan ketahanan pangan, Untuk itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai mengacu pada visi Kabupaten Banggai tahun 2016 -2021, yaitu:

“ MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN, DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA ”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten



dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Banggai secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu :

1. Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis sehingga merangsang aktifitas ekonomi masyarakat di berbagai lapisan;
2. Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai pusat pengembangan pertanian termasuk sub sektor urusan pangan dengan membentuk cadangan pangan Kabupaten sehingga menjadi cadangan pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai pusat kemaritiman melalui pengembangan sektor pelayaran dan perdagangan yang memungkinkan mobilitas barang dan jasa semakin meningkat;
4. Berbasis kearifan lokal adalah upaya mengembangkan pembangunan agar tercipta keselarasan dan harmonisasi dalam lingkungan yang relevan dengan norma tradisional dan sosial masyarakat Kabupaten Banggai;
5. Budaya merupakan penyertaan nilai-nilai luhur yang dilestarikan dan dapat menjadi pijakan bagi kelangsungan Pembangunan.

Perwujudan Kabupaten Banggai menuju kondisi ideal sebagaimana dimaksud dalam visi ini dilakukan secara terus-menerus, serta dilakukan dengan kerja keras, hal ini berarti pembangunan daerah Kabupaten Banggai bermuara pada kepentingan masyarakat.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Banggai menetapkan misi, tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. **Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa** diarahkan pada upaya menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih pada seluruh struktur pemerintahan daerah secara disiplin dan sungguh-sungguh,



sehingga diharapkan akan tercipta sistim pemerintahan dan birokrasi daerah yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta meningkatkan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan fungsi pelayanan publik yang prima dan berbasis teknologi informasi, peningkatan sinergitas antar pelaku/stakeholders pembangunan, utamanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan;

2. **Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi** dengan tujuan meningkatkan dan mengoptimalkan produksi pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi serta memanfaatkan teknologi di sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam, dan bergizi;
3. **Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah** melalui misi ini diharapkan keunggulan kompetitif Kabupaten Banggai di sektor kemaritiman dapat lebih ditingkatkan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, konektivitas dan perdagangan antar pulau;
4. **Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata** dengan tujuan memberi daya ungkit terhadap optimalisasi pengembangan berbagai potensi daerah, tetapi juga akan membuka keterisoliran wilayah dan aksesibilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. **Mewujudkan pengembangan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya,** misi ini dimaksud untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat sehingga tercipta tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi solidaritas sosial dan kearifan lokal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat melalui penguatan lembaga adat, sehingga akan menjamin terciptanya rasa aman untuk berpartisipasi dalam setiap program pembangunan;



6. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah** dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi, yang mana masyarakat di Kabupaten Banggai mampu mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan berkualitas, yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya yang telah maju, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai mengacu pada misi yang ke dua yaitu **“Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi”**.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai mengacu pada Tujuan Strategis Kabupaten Banggai dalam RPJMD yaitu **“ Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian Menuju Banggai Swasembada Pangan Berkelanjutan”**, dengan sasaran **“Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah”**.

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai adalah: **“Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah”** dengan Sasaran Strategis **“Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman serta terjangkau bagi masyarakat”**

Arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan adalah:

1. Meningkatkan peran penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
2. Penyediaan sarana dan prasarana Sumber Daya Pangan;
3. Penanganan daerah rawan pangan transien dan kronis;
4. Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi distribusi pangan dan perdagangan pangan;
6. Menjaga stabilitas harga pangan;
7. Meningkatkan stok Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat;
8. Merubah perilaku masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang B2SA dengan melakukan penyuluhan, promosi, dan lomba menu B2SA;



9. Meningkatkan pengetahuan pada anak sejak dini tentang penganekaragaman pangan dan gizi;
10. Melakukan inspeksi, sosialisasi, dan penyuluhan serta pendampingan keamanan pangan segar, jajanan, dan olahan;
11. Membentuk tim terpadu untuk pengawasan terhadap pangan segar, jajanan, dan pangan olahan
12. Pemantapan manajemen, pelayanan, pengelolaan administrasi, pelaporan dan keuangan;
13. Peningkatan disiplin ASN, kualitas SDM serta sarana dan prasarana Dinas Ketahanan Pangan.

Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, distribusi pangan serta kemampuan daya beli masyarakat. Oleh karena itu Koordinasi lintas sektor melalui peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan sangat diperlukan untuk :

- Meningkatkan kapasitas produksi pangan melalui penetapan lahan abadi untuk produksi pangan dalam rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan kualitas lingkungan serta sumberdaya lahan dan air.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi dan perdagangan pangan melalui pengembangan infrastruktur distribusi, pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar daerah serta membuka daerah yang terisolir, pengembangan sistem informasi pasar, dan penguatan lembaga pemasaran daerah,
- Menjaga Stabilitas Harga Pangan, melalui peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan, pengembangan sistem tunda jual , pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga dan stok minimal bulanan.

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 dapat dilihat pada **tabel 1**.



Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021

Visi RPJMD : MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN, DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA				
MISI II : MENGEMBANGKAN PERTANIAN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAERAH (IKU)	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Serta Terjangkau Bagi Masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan	1. Menyusun Neraca Bahan Makanan 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Pangan 3. Penanganan Daerah Rawan Pangan transien dan kronis 4. Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi 5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi distribusi pangan dan perdagangan pangan 6. Menjaga stabilitas harga pangan 7. Meningkatkan stok cadangan pangan pemerintah kabupaten dan masyarakat.
		2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	2. Meningkatkan Distribusi dan Cadangan Pangan	1. Merubah perilaku masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang B2SA dengan melakukan penyuluhan penganeekaragaman pangan dan gizi, promosi dan lomba menu B2SA; 2. Meningkatkan pengetahuan pada anak sejak dini tentang penganeekaragaman pangan dan gizi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LkJP 2019**
 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai



			2. Meningkatkan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar dan Olahan	3. Melakukan inspeksi, sosialisasi dan penyuluhan serta pendampingan keamanan pangan segar, jajanan, dan olahan. 4. Membentuk tim terpadu untuk pengawasan terhadap pangan segar, jajanan, dan pangan olahan
MENINGKATKAN TATA KELOLA DINAS KETAHANAN PANGAN YANG BAIK, BERSIH, DAN AKUNTABEL (NON IKU)	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Ketahanan Pangan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja A 2. Persentase Peningkatan Disiplin ASN	1. Meningkatkan Sistem Pelayanan di bidang Ketahanan Pangan 2. Meningkatkan Disiplin ASN dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan	1. Pemantapan manajemen, pelayanan, pengelolaan administrasi, pelaporan dan keuangan 2. Peningkatan disiplin ASN, kualitas SDM serta sarana dan prasarana Dinas ketahanan Pangan



B. RENCANA KERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2016 – 2021, maka disusun Rencana Kerja Tahun 2019 sebagai pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019, seperti pada **tabel 2** berikut :

Tabel 2. Rencana Kerja Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	Target
1	2	3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	400 Lembar
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan
4	Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan
7	Penyediaan makanan dan minuman	100%
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	23 Kecamatan
10	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	18 Orang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 Unit
18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Unit
19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	18 Unit



No.	Program/Kegiatan	Target
1	2	3
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS		
20	Pemulangan pegawai yang pensiun	1Orang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
21	Pendidikan dan pelatihan formal	1 Ls
22	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	200 Orang
23	Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	4 Kegiatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
24	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan
25	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1 Laporan
26	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 Laporan
27	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	6 Dokumen
28	Publikasi kinerja perangkat daerah	12 Bulan
29	Penyusunan laporan inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	3 Laporan
Program Pengembangan Sistem Informasi/Data		
30	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	1 Dokumen
Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan		
31	Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen
32	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	2 Laporan



No.	Program/Kegiatan	Target
1	2	3
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		
33	Penanganan Daerah Rawan Pangan	315 KK
34	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	1 Dokumen
35	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	1 Dokumen
36	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	1 Laporan
37	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	200 Rumah Tangga
38	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	1 Dokumen
39	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	12 Laporan
40	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	20 Ton
41	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	1 Laporan
42	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	6 Ton
43	Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	3 Kelompok
44	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	4 Kelompok
45	Pengembangan Sumber Daya Pangan	3 Kelompok
46	Fasilitas Dewan Ketahanan Pangan	1 Rumusan/ Kesepakatan
47	Gerakan Penganekaragaman Pangan dan Gizi	7 Desa
48	Pengembangan dan Promosi Produksi Pangan Lokal	3 Pameran
49	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Bahaya	100 Sampel
50	Peningkatan Sistem Informasi Keamanan Pangan	3 Media 4 kali
51	Pengembangan Ketersediaan Pangan	147 Orang 1 Dokumen
52	Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional	2 Kelompok
53	Pembangunan Lumbung Pangan	14 Unit



Program dan kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran masih merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan tahun sebelumnya. Realisasi pencapaian target dalam rencana kerja tersebut kemudian dievaluasi dan dianalisis, serta dijadikan referensi untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mendukung pelaksanaan misi pertama Kabupaten Banggai, yaitu menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih, Dinas Ketahanan Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019 sebagai acuan/tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada merupakan perjanjian kinerja dan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019.

Perjanjian Kinerja yang dibuat adalah antara Kepala Dinas dengan Bupati Banggai dan dengan Eselon dibawahnya (Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala seksi), sesuai dengan Indikator Utama yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama merupakan tolok ukur keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan dengan skor PPH Ketersediaan sebesar 90,3 pada tahun 2021;
2. Meningkatnya Keragaman konsumsi terhadap pangan lokal sehingga skor PPH konsumsi mencapai 77,5 pada tahun 2021;



Target Indikator Kinerja Utama sesuai RENSTRA Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,7	90	90,1	90,2	90,3
	Ketersediaan					
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	75	76	76,8	77	77,5
	Konsumsi					

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1(satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan proporsi anggaran yang tersedia. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana terlihat pada **tabel 4**, memuat satu sasaran strategis dengan dua indikator kinerja utama yang harus dicapai pada Tahun 2019 yang dilaksanakan melalui satu program teknis yaitu: Program Peningkatan Ketahanan Pangan, sedangkan untuk dukungan manajemen dan teknis lainnya dilaksanakan melalui tujuh program yaitu: (1) Program Pelayanan administrasi perkantoran, (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, (3) Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas, (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, (6) Program Pengembangan Sistem Informasi/Data, (7) Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan.

Pada awal tahun 2019, Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.896.015.888. dalam pelaksanaan kegiatan, terjadi perubahan-perubahan yang menyebabkan adanya



perubahan alokasi anggaran di beberapa kegiatan, perubahan yang terjadi adalah karena adanya revisi anggaran tahun 2019, tetapi tidak merubah total anggaran yang telah di alokasikan untuk Dinas Ketahanan Pangan.

Tabel. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan
1.	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman serta Terjangkau Bagi Masyarakat	1. Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor PPH	90,1
		2. Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor PPH	76,8
No.	Program		Anggaran	
1.	Program Pelayanan administrasi perkantoran		Rp.	979.331.087;
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp.	37.740.000;
3.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas		Rp.	3.790.700;
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp.	174.780.000;
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp.	188.600.000;
6.	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data		Rp.	5.010.000;
7.	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan		Rp.	72.938.800;
8.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		Rp.	4.433.825.301;

Selanjutnya guna mendukung pencapaian target sebagaimana dimaksud maka didukung dengan program dan kegiatan seperti pada **tabel 5**, berikut:



Tabel 5. Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	Program/Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman Serta Terjangkau Bagi Masyarakat	1. Meningkatnya Skor 'PPH Ketersediaan	90,1	<p>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan daerah rawan pangan 2. Penyusunan data base potensi produksi pangan 3. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 4. Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 5. Pengembangan cadangan pangan daerah 6. Pengembangan Desa Mandiri Pangan 7. Pengembangan lumbung pangan desa 8. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien 9. Pengembangan sumber daya pangan 10. Pengembangan ketersediaan pangan 11. Pembangunan Lumbung Pangan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LkjIP 2019**
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	Program/Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman Serta Terjangkau Bagi Masyarakat	2. Meningkatnya Skor PPH Konsumsi	76,8	<p>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</p> <p>12. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan</p> <p>13. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan</p> <p>14. Peningkatan mutu dan keamanan pangan</p> <p>15. Gerakan Penganekaragaman pangan dan Gizi</p> <p>16. Pengembangan dan promosi produksi pangan lokal</p> <p>17. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan bahaya</p> <p>18. Peningkatan Sistim Informasi Keamanan Pangan</p> <p>19. Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional</p>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LkJP 2019**
 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	Program/Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatkan Tata Kelola Dinas Ketahanan Pangan yang baik, bersih dan akuntabel (Non IKU)	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Ketahanan Pangan yang baik, bersih dan akuntabel	1. Nilai Evaluasi AKIP	BB	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>20. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>21. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>22. Penyediaan jasa kebersihan kantor</p> <p>23. Penyediaan alat tulis kantor</p> <p>24. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>25. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</p> <p>26. Penyediaan makanan dan minuman</p> <p>27. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p> <p>28. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</p> <p>29. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>30. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>31. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</p> <p>32. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LkjiP 2019**
 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	Program/Kegiatan
1	2	3	4	5
				<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>33. Pendidikan dan pelatihan formal</p> <p>34. Sosialisasi peraturan perundang-undangan</p> <p>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>35. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p> <p>36. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</p> <p>37. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</p> <p>38. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD</p> <p>39. Publikasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>40. Penyusunan laporan inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)</p> <p>Program Pengembangan Sistem Informasi/Data</p> <p>41. Penyusunan Profil Perangkat Daerah</p>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LkJP 2019**
 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	Program/Kegiatan
1	2	3	4	5
				Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 42. Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa 43. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 44. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 45. Fasilitas Dewan Ketahanan Pangan
Meningkatkan Tata Kelola Dinas Ketahanan Pangan yang baik, bersih dan akuntabel (Non IKU)	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Ketahanan Pangan yang baik, bersih dan akuntabel	2. Persentase Peningkatan Disiplin ASN	100%	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 46. Pemulangan pegawai yang pensiun Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 47. Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur



BAB *III*

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Adalah realisasi indikator dibandingkan dengan target indikator dikalikan 100 persen. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

- Sangat berhasil : $\geq 100\%$
- Berhasil : 80 - 99%
- Cukup Berhasil : 50 - 79%
- Tidak Berhasil : $< 50\%$



$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan yang digunakan pada tahun 2019 mengacu pada sasaran yang telah disusun pada Rencana Strategis (Renstra), IKU, RENJA, dan PK Dinas Ketahanan Pangan, serta mengikuti perubahan kebijakan dan lingkungan strategis selama tahun 2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Terpenuhinya setiap target yang direncanakan pada setiap sasaran ditentukan oleh: (a) sasaran dan target yang direncanakan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sejak tahun sebelumnya, yang terus mengalami perkembangan yang cukup baik; dan (b) kerja sama dari seluruh pelaksana kegiatan yang berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Penjelasan secara rinci mengenai metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dari masing-masing indikator dapat dilihat pada **tabel 6**, berikut.



Tabel. 6 Penjelasan Metode Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019

No.	Indikator	Target	Keterangan
1	2.	3	4
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (IKU)	90.1	Semakin besar capaian keberhasilan Skor PPH Ketersediaan, semakin beragam ketersediaan pangan bagi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (IKU)	76.8	Semakin besar capaian keberhasilan Skor PPH Konsumsi, semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik
3.	Nilai Evaluasi AKIP (Non IKU)	BB	Semakin besar capaian keberhasilan Nilai Evaluasi AKIP, semakin memuaskan, kinerja tinggi dan akuntabel, sehingga capaian kinerja semakin baik
4.	Persentase Peningkatan Disiplin ASN (Non IKU)	100%	Semakin besar capaian keberhasilan disiplin ASN, maka semakin baik tingkat disiplin pegawai, sehingga capaian kinerja semakin baik



1. Target dan Realisasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019

Pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja yang tertera pada **tabel 7**.

Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan yaitu terdiri dari satu sasaran strategis yang selanjutnya diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja utama. Dari dua indikator kinerja utama tersebut, pengukuran tingkat capaian kinerja sudah menunjukkan hasil yang baik dimana dari dua indikator, satu indikator Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 sudah mencapai lebih dari 100 persen atau sangat berhasil.

Tabel. 7 Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Persen tase Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman Serta Terjangkau Bagi Masyarakat (Sasaran Strategis)	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (IKU)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan - Meningkatkan Distribusi dan cadangan Pangan 	90.1	49.55	55%
		2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (IKU)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan - Meningkatkan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar dan Olahan 	76.8	88.2	114.8%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LkJP 2019**
 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Ketahanan Pangan yang baik, bersih dan akuntabel	1. Nilai Evaluasi AKIP (Non IKU)	- Meningkatkan Sistem Pelayanan di bidang Ketahanan Pangan	BB	BB	100%
		2. Persentase Peningkatan Disiplin ASN (Non IKU)	- Peningkatan disiplin ASN, kualitas SDM serta sarana dan prasarana Dinas ketahanan Pangan	100%	95%	95%

Dari tabel 7. dapat dilihat sasaran 1 yang merupakan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan yaitu meningkatkan ketersediaan pangan dengan indikator kinerja utama yaitu: (1) meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan tidak terealisasi sesuai target yaitu sebesar 49,55 dari target 90,1 dengan capaian 55% atau cukup berhasil, hal ini disebabkan karena setelah dilakukan reviu ternyata pada saat penghitungan PPH ketersediaan tidak tersedia data ekspor impor, selain itu disebabkan oleh masih rendahnya produksi komoditas pertanian yaitu umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan, kelompok bahan minyak dan lemak, buah dan biji berminyak juga komoditas pangan hewani. Selain itu ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras juga menjadi salah satu penyebab rendahnya skor PPH Kabupaten Banggai.

Indikator kinerja utama ke dua (2) meningkatkan skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi terealisasi sebesar 88,2 dari target 76,8 dengan capaian 114,8% atau sangat berhasil, hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat Kabupaten Banggai sudah menuju ke pola konsumsi yang beragam, pencapaian ini harus terus ditingkatkan dengan penyuluhan dan promosi pangan yang B2SA (beragam, bergizi, seimbang, dan aman) agar



kesadaran masyarakat akan konsumsi pangan yang B2SA semakin meningkat.

Sasaran 2, bukan merupakan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan namun merupakan sasaran yang merupakan dukungan manajemen dan teknis lainnya, yang terdiri dari dua indikator kinerja yaitu meningkatkan nilai evaluasi AKIP dan persentase peningkatan disiplin ASN.

Indikator kinerja meningkatkan nilai evaluasi AKIP tahun 2019 target BB dan terealisasi BB, sehingga capaian kerjanya sebesar 100% dikategorikan sangat berhasil. Sedangkan Indikator Kinerja peningkatan disiplin ASN target 2019 100% dan terealisasi 95% dengan capaian 95% dan dikategorikan berhasil

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 berisi Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja Eselon III meliputi Indikator Kinerja Program, Perjanjian Kinerja Eselon IV meliputi Indikator Kinerja Kegiatan. Pencapaian Kinerja Eselon III dan Eselon IV dapat dilihat pada **tabel 8** dan **tabel 9**, berikut.



**Tabel. 8 Capaian Realisasi Target Indikator Kinerja Program
 Perjanjian Kinerja Eselon III
 Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Kesekretariatan	- Persentase Peningkatan Layanan Perkantoran	100	%	100	100%
		- Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	100	100%
		- Persentase Fasilitas Pindah/Purna Tugas	100	%	100	100%
		- Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur	100	%	100	100%
		- Persentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	%	100	100%
		- Persentase Pengembangan Sistim Informasi/Data	100	%	100	100%
		- Persentase Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	100	%	100	100%
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Ketahanan Pangan Dalam Mencapai Tujuan Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Fungsi dan Peran Dewan Ketahanan Pangan	1	Rumusan	-	0%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LkjIP 2019**
 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai



No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
	BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN					
3.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan	- Angka Ketersediaan Energi	2100	kcal/kapita/hari	4813	229%
		- Angka Ketersediaan Protein	63	gr/kapita/ hari	103.07	164%
		- Berkurangnya Jumlah Desa Rawan Pangan	1	Desa	7	700%
	BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN					
4.	Meningkatnya Distribusi dan Cadangan Pangan	- Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	20	%	20	100%
		- Ketersediaan Informasi Pasokan dan Harga Pangan	2	Laporan	2	100%
	BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN					
5	Meningkatnya Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan	- Angka Konsumsi Energi	2150	kcal/kapita/hari	2339.66	109%
		- Angka Konsumsi Protein	52	gr/kapita/hari	63.48	122%
	BIDANG KEAMANAN PANGAN					
6	Meningkatnya Keamanan Pangan dan Mutu Pangan segar dan Olahan	- Persentase Keamanan Pangan dan Mutu Pangan segar dan Olahan	73	%	95.24	130%



Berdasarkan tabel.8 dapat dilihat bahwa capaian realisasi target indikator kinerja program perjanjian kinerja Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dengan nilai pencapaian 100% (sangat berhasil) yaitu: 1) Persentase Peningkatan Layanan Perkantoran, 2) Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur, 3) Persentase Fasilitas Pindah/Purna Tugas, 4) Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, 5) Persentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 6) Persentase Pengembangan Sistem Informasi/Data, 7) Persentase Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan. Sedangkan untuk indikator meningkatnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan capaiannya 0% (tidak berhasil) karena kegiatan Sidang Dewan Ketahanan Pangan tidak dapat dilaksanakan akibat terjadi pembatasan penggunaan dana yang bersumber dana DBH.

Capaian realisasi target indikator kinerja program perjanjian kinerja Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dengan nilai capaian lebih dari 100% (Sangat Berhasil) yaitu : 1) Angka Ketersediaan Energi, 2) Angka Ketersediaan Protein, dan 3) Berkurangnya jumlah desa rawan pangan.

Capaian realisasi target indikator kinerja program perjanjian kinerja Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dengan nilai capaian 100% (Sangat Berhasil) yaitu: 1) Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, dan 2) Ketersediaan Informasi Pasokan dan Harga Pangan. Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan komitmen Dinas Ketahanan Pangan terhadap keberlanjutan cadangan pangan pemerintah Kabupaten yang harus ada yaitu sebesar 20 ton untuk tahun 2019.

Capaian realisasi target indikator kinerja program perjanjian kinerja Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dengan nilai capaian lebih dari 100% (Sangat Berhasil) yaitu: 1) Angka Konsumsi Energi dan 2) Angka Konsumsi Protein, hal ini disebabkan karena konsumsi energi dan protein masyarakat di Kabupaten Banggai sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu konsumsi energi dengan target 2.150 kkal/kapita/hari dan terealisasi 2.339,66 kkal/kapita perhari, sedangkan konsumsi protein dengan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LkJP 2019** *Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai*



target 52 gr/kapita/hari terealisasi 63,48 gr/kapita/hari, sehingga menunjukkan sudah terpenuhinya konsumsi pangan masyarakat.

Capaian realisasi target indikator kinerja program perjanjian kinerja Kepala Bidang Keamanan Pangan dengan nilai capaian lebih dari 100% (Sangat Berhasil), dengan indikator Persentase Keamanan Pangan dan Mutu Pangan segar dan Olahan, indikator ini berhasil melebihi target tahun 2019 yaitu dari target 73% terealisasi 95,24% dengan capaian kinerja 130% (sangat berhasil), karena dari 147 sampel pangan segar dan olahan yang di uji hanya 7 sampel yang terindikasi mengandung bahan berbahaya dan 140 sampel teruji aman untuk dikonsumsi.



**Tabel. 9 Capaian Realisasi Target Indikator Kinerja Kegiatan
 Perjanjian Kinerja Eselon IV
 Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
Sub. Bagian Perencanaan dan Evaluasi						
1	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP	1	Dokumen	1	100
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, dan LKPJ-PD	6	Dokumen	6	100
3	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	2	Dokumen	2	100
		Jumlah Dokumen Monev dan TEPPRA	2	Dokumen	2	100
4	Tersusunnya Profil Perangkat Daerah	Jumlah Profil Dinas Ketahanan Pangan	1	Dokumen	1	100
Sub. Bagian Keuangan dan Aset						
5	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1	Dokumen	1	100
6	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen	1	100
7	Tersedianya Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Bulan	12	100
8	Terlaksananya Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai	Jumlah Laporan Inventarisasi ASET PEMDA Banggai (OPD)	1	Dokumen	1	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LkJP 2019**
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian						
9	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	12	100
		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12	Bulan	12	100
		Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	12	100
		Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	Bulan	12	100
		Persentase Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	%	50	50
		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	Bulan	12	100
		Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman	100	%	84	84
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12	Bulan	12	100
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	23	Kecamatan	23	100
		Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	12	Bulan	12	100
10	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100	%	100	100
		Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100	%	83.33	83.33
		Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100	%	0	0

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LKJIP 2019**
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7
11	Tersedianya Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Yang Pensiun	1	Orang	1	100
12	Tersedianya Jasa Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Penyediaan Biaya Kontribusi Pelatihan Bagi Pegawai	100	%	100	100
13	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	200	orang	200	100
14	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	4	Kegiatan	4	100
15	Terlaksananya Pemantauan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Jumlah Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	1	Laporan	-	0
16	Terlaksananya Fasilitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah	Jumlah Rumusan/Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	1	Rumusan/ Kesepakatan	-	0
Seksi Ketersediaan Pangan						
17	Terlaksananya Analisis Stok Gabah dan Beras	Jumlah Dokumen Analisis Stok Gabah dan Beras	1	Dokumen	1	100
18	Terlaksananya Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	Dokumen	1	100
19	Tersedianya Bahan Makanan Tambahan Untuk ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Jumlah ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Mendapat Bantuan Bahan Makanan Tambahan	147	Orang	147	100
Seksi Sumber Daya Pangan						
20	Tersedianya Dokumen Data Base Potensi Produksi Pangan	Jumlah Dokumen Data Base Potensi Produksi Pangan	1	Dokumen	1	100
21	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sumber Daya Pangan Desa Rawan Pangan	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapatkan Bantuan	3	Kelompok	3	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LKJIP 2019**
 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Seksi Kerawanan Pangan						
22	Tersedianya Laporan Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah Laporan SKPG	1	Laporan	1	100
23	Tersedianya Bahan Makanan Sumber Energi dan Protein Untuk Daerah Rawan Pangan	Jumlah Rumah Tangga Miskin Daerah Rawan Pangan Yang Diintervensi	315	KK	315	100
Seksi Distribusi Pangan						
24	Terlaksananya Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	Jumlah Kelompok Distribusi Pangan Yang Tertangani	3	Kelompok	3	100
Seksi Cadangan Pangan						
25	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	20	Ton	20	100
		Jumlah Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Serta Kelengkapannya Yang Dibangun Untuk Masyarakat	14	Unit	14	100
26	Tersalurnya Bantuan Pengisian Lumbung Pangan Kepada Kelompok	Jumlah Bantuan Pengisian Lumbung Pangan	6	Ton	6	100
Seksi Harga Pangan						
27	Terlaksananya Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Jumlah Laporan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	12	Bulan	12	100
Seksi Promosi dan Penganeekaragaman Pangan						
28	Terlaksananya Gerakan Penganeekaragaman Pangan dan Gizi	Jumlah Desa Sosialisasi Penganeekaragaman Pangan dan Gizi, dan Promosi B2SA	7	Desa	2	29
29	Terlaksananya Pengembangan dan Promosi Produksi Pangan Lokal	Jumlah Ivent Pengembangan dan Promosi Produksi Pangan Lokal Yang Diikuti	3	Kali	3	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LkJP 2019**
 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Seksi Pengembangan Pangan Lokal						
30	Terlaksananya Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional	Jumlah Kelompok Usaha Pangan Lokal dan Tradisional Yang Dikembangkan	2	Kelompok	2	100
Seksi Konsumsi Pangan						
31	Tersusunnya Dokumen Analisis Pola Konsumsi Pangan (AKE dan AKP)	Jumlah Dokumen Analisis Pola Konsumsi Pangan (AKE dan AKP)	1	Dokumen	1	100
32	Terlaksananya Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Jumlah Kelompok dan Rumah Tangga Menerima Bantuan Pemanfaatan Pekarangan	200	Rumah Tangga	200	100
Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan						
33	Terlaksananya Peningkatan Sistim Informasi Keamanan Pangan	Jumlah Publikasi Informasi Keamanan Pangan	3	Media	3	100
		Jumlah Inspeksi Pengawasan Keamanan Pangan	4	Kali	4	100
Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan						
34	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Kelompok Tani Yang Menerima Sertifikat Mutu dan Keamanan Pangan	4	Kelompok	4	100
Seksi Pengawasan Keamanan Pangan						
35	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Bahaya	Jumlah Sampel Pangan Yang Diuji	100	Sampel	147	147



2. Target dan Realisasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 dan Beberapa Tahun sebelumnya

Evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dijadikan acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya agar kinerja semakin baik, realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada **tabel 10**.



Tabel. 10. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017 s.d Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Persen tase Capaian	Target	Realisasi	Persen tase Capaian	Target	Realisasi	Persen tase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman Serta Terjangkau Bagi Masyarakat	1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan - Meningkatkan Distribusi dan cadangan Pangan 	89.7	89.7	100%	90	47.88	53%	90.1	49.55	55%
		2. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan - Meningkatkan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar dan Olahan 	75	75	100%	76	87.4	115%	76.8	88.2	114.8%



Dari **tabel 10**. Dapat dilihat bahwa perkembangan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai selama tiga tahun terakhir dari dua indikator, satu indikator capaiannya lebih dari 100% atau sangat berhasil, yaitu skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi. Sedangkan satu indikator lagi yaitu skor pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan capaiannya hanya pada tahun 2017 nilai capaiannya 100%, sedangkan pada tahun 2018 dan tahun 2019 nilai capaiannya 53% dan 55% tidak mencapai 100% tetapi masih masuk dalam kategori cukup berhasil.

Indikator Meningkatnya skor pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan memperlihatkan penurunan skor, di tahun 2017 skor PPH Ketersediaan target 89,7 dan realisasi 89,7 sehingga capaiannya 100% atau sangat berhasil, tetapi di tahun 2018 skor PPH Ketersediaan mengalami penurunan dari target 90 dan realisasi 47,88 dengan capaian yaitu 53% (cukup berhasil) dan tahun 2019 skor PPH target 90,1 realisasi 49,55 dan capaiannya 55% (cukup berhasil) atau meningkat 2% dari tahun 2018, hal ini disebabkan karena setelah dilakukan reviu ternyata pada saat penghitungan PPH ketersediaan data ekspor impor tidak tersedia, masih rendahnya produksi komoditas pertanian yaitu umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan, kelompok bahan minyak dan lemak, buah dan biji berminyak juga komoditas peternakan yaitu bahan pangan hewani. Selain itu ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras juga menjadi salah satu penyebab rendahnya skor PPH Kabupaten Banggai, karena skor PPH Ketersediaan menggambarkan keberagaman ketersediaan pangan masyarakat. Sehingga keberhasilan capaian kinerja skor PPH Ketersediaan Dinas Ketahanan Pangan dipengaruhi oleh produksi pangan di Kabupaten Banggai oleh karena itu koordinasi lintas sektor dengan dinas-dinas terkait pangan perlu untuk ditingkatkan agar produksi pangan meningkat dan beraneka ragam dan akan berimbas pada meningkatnya skor PPH Ketersediaan.

Sebagaimana terlihat dalam tabel 10. Keberhasilan peningkatan skor PPH Konsumsi selama tiga tahun terakhir tahun 2017-2019 yaitu dari 75



menjadi 88,2 ini menunjukkan konsumsi pangan masyarakat semakin baik/semakin beragam. Skor PPH Konsumsi tahun 2019 sebesar 88,2 atau mencapai 114,8% (sangat berhasil) dari target 76,8. Capaian kinerja skor PPH Konsumsi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, capaian kinerja meningkat 15% dan tahun 2019 turun 0.20% tetapi capaiannya lebih dari 100%.

3. Pencapaian Realisasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dengan Target Jangka Menengah Dalam Rencana Strategis.

Pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dapat dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (RENSTRA), seperti yang pada **tabel 11** berikut.



Tabel. 11. Capaian Realisasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dengan Target Jangka Menengah sesuai RENSTRA Tahun 2016-2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Strategi	Target Pada Tahun					Realisasi Tahun		
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman Serta Terjangkau Bagi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan Meningkatkan Distribusi dan cadangan Pangan	89.7	90	90.1	90.2	90.3	89.7	47.88	49.55
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Meningkatkan Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Meningkatkan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar dan Olahan	75	76	76.8	77	77.5	75	87.4	88.2



Dari **tabel 11**. Dapat dilihat bahwa selama tiga tahun ini yaitu tahun 2017 s.d tahun 2019 dari dua target indikator kinerja utama, satu indikator kinerja tercapai 100 persen bahkan lebih sesuai dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA, dan satu indikator yang belum mencapai target.

4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 Dengan Standar Nasional

Pencapaian pembangunan Ketahanan Pangan secara nasional dapat tercapai dengan baik jika seluruh daerah mendukung program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan nasional. Berikut uraian analisis perbandingan hasil pengukuran kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai tahun 2019 dengan standar nasional, berdasarkan sasaran strategis dan indikator dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai tahun 2016-2021.

1) Peningkatan Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan, untuk itu diperlukan informasi mengenai situasi pangan disuatu negara/daerah pada periode tertentu.

Informasi mengenai situasi penyediaan pangan secara menyeluruh disuatu negara/wilayah digambarkan melalui Neraca Bahan Makanan (*Food Balance Sheet*), yang sekaligus menjadi salah satu Indikator Tersedianya Pangan dalam jumlah yang cukup.

Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Banggai Tahun 2019 berdasarkan hasil penghitungan Neraca Bahan Makanan dan perbandingannya dengan skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Nasional dapat dilihat pada **tabel. 12**. Sedangkan perbandingan antara angka



kecukupan energi dan protein Kabupaten Banggai dengan standar nasional dapat dilihat pada **tabel. 13**.

Tabel. 12. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kabupaten Banggai Tahun 2019

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Kab.Banggai	Skor PPH Maksimal
1.	Padi-Padian	25,0	25,0
2.	Umbi-Umbian	2,1	2,5
3.	Pangan Hewani	3,7	24,0
4.	Minyak dan Lemak	0,1	5,0
5.	Buah/Biji berminyak	0,0	1,0
6.	Kacang-Kacangan	6,2	10,0
7.	Gula	2,5	2,5
8.	Sayuran dan Buah	10	30,0
Jumlah		49,55	100,00

Sumber : *Neraca Bahan Makanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2019*

Berdasarkan tabel 12. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kabupaten Banggai Tahun 2019 adalah 49,55 ini masih jauh dibawah dari skor PPH Ketersediaan ideal yang diharapkan secara nasional yaitu mencapai skor 100 atau masih kurang 50,45 point. Masih rendahnya skor PPH Ketersediaan Kabupaten Banggai terutama disebabkan oleh masih rendahnya produksi komoditas pertanian yaitu umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan, kelompok bahan minyak dan lemak, buah dan biji berminyak juga komoditas pangan hewani.

Selain itu ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras juga menjadi salah satu penyebab rendahnya skor PPH Kabupaten Banggai. Untuk Kabupaten Banggai dari 9 kelompok bahan pangan hanya 2 kelompok bahan pangan yang telah mencapai skor PPH maksimal yaitu kelompok padi-padian dan gula.



Tabel. 13. Angka Kecukupan Energi dan Protein Kabupaten Banggai Tahun 2019

No.	Ketersediaan	Tahun 2019	Nasional
1.	Energi (kkal/kapita/hari)	4.813	2.400
2.	Protein (gram/kapita/hari)	103,07	63

Dari **tabel.13.** dapat dilihat bahwa ketersediaan energi Kabupaten Banggai tahun 2019 yaitu sebesar 4.813 kkal/kapita/hari sudah memenuhi angka anjuran nasional yang sebesar 2.400 kkal/kapita/hari sekitar 201% dari anjuran, namun belum berimbang karena masih didominasi oleh kelompok padi-padian.

Sedangkan untuk ketersediaan protein Kabupaten Banggai tahun 2019 adalah sebesar 103,07 gram/kapita/hari, angka ini telah memenuhi angka kecukupan protein yang dianjurkan secara nasional yaitu sebesar 63 gram/kapita/hari, ketersediaan protein Kabupaten Banggai bersumber dari protein nabati yaitu sebesar 96,64 gram/kapita/hari atau 93,76% dan yang bersumber dari protein hewani sebesar 6,43 gram/kapita/hari atau 6,24%.

2) Meningkatkan Ketahanan Pangan dengan penguatan cadangan pangan

Cadangan pangan merupakan indikator kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja utama Skor PPH Ketersediaan. Cadangan pangan merupakan salah satu sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah. Stabilitas pasokan pangan dapat dijaga dengan pengelolaan cadangan yang tepat. Cadangan pangan terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan masyarakat diarahkan untuk mengembangkan lumbung pangan masyarakat yang mencakup pembangunan lumbung pangan,



pengisian lumbung pangan, dan penguatan modal untuk pengembangan usaha kelompok.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki cadangan pangan di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras. Dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai target indikator cadangan pangan kabupaten adalah sebesar 20% dan realisasi capaiannya adalah 100%, yang mana kegiatan yang dilakukan di tahun 2019 adalah pengisian cadangan pangan pemerintah kabupaten sebanyak 20 ton, yang berarti cadangan pangan pemerintah Kabupaten Banggai masih jauh dari target nasional yaitu 100 ton untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, perbandingan tersebut dapat dilihat pada **tabel 14**.

Tabel 14. Cadangan Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2019

No.	Uraian	Kabupaten Banggai tahun 2019	Permentan No.65 tahun 2010
1.	Cadangan Pangan Kabupaten	20 ton	100 ton

3) Meningkatnya keragaman konsumsi pangan

Salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai adalah skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi. Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.



Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan risiko usaha pola monokultur, meredam gejolak harga, mengurangi gangguan kehidupan biota disuatu kawasan, meningkatkan pendapatan petani dan menunjang pelestarian sumber daya alam. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi pemerintah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Disamping itu jika dilihat dari kepentingan kemandirian pangan maka penganekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan. Dengan demikian penganekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan.

Indikator yang digunakan untuk menilai peningkatan kualitas pangan dan gizi diantaranya, adalah pemenuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal yang tergambar dalam konsumsi energi, konsumsi protein dan peningkatan skor Pola Pangan Harapan. Perbandingan antara skor pola pangan harapan konsumsi Kabupaten Banggai dengan target nasional seperti pada **tabel 15**.



Tabel 15. Perbandingan Skor PPH Konsumsi Kabupaten Banggai Dengan Target Nasional (Sesuai RPJMN tahun 2015-2019)

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Skor PPH Konsumsi Kabupaten Banggai	75	87,4	88,2
2.	Skor PPH Konsumsi Target Nasional	88,4	90,5	92,5

Berdasarkan tabel 14. Skor PPH Konsumsi Kabupaten Banggai selama periode RENSTRA tahun 2017-2019 masih berada di bawah target nasional. Kondisi ini dikarenakan konsumsi masyarakat masih kurang beragam, yang ditujukan dengan masih tingginya konsumsi padi-padian, dan rendahnya konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan, serta umbi-umbian. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: 1) perilaku masyarakat yang masih merasa belum makan jika belum makan nasi, 2) masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), 3) kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu, 4) berbagai produk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap sebagai pangan inferior, 5) belum maksimalnya kerjasama lintas sektor serta lemahnya partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang melalui : 1) peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) melalui komunikasi, informasi, edukasi (penyuluhan di tingkat lapangan, lomba cipta menu B2SA, dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik), 2) upaya penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta



konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumber daya lokal, 3) peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, dan kacang-kacangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga. Upaya diatas merupakan daya ungkit yang cukup besar dalam meningkatkan skor PPH Konsumsi.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019 dapat dilihat pada **tabel 7.**, dari dua indikator kinerja utama satu indikator yang memiliki capaian kinerja lebih dari 100% atau sangat berhasil, yaitu: Skor PPH Konsumsi. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut tentunya sangat didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang merupakan instansi teknis menangani urusan pangan serta dukungan anggaran.

Satu Indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019 tidak mencapai target tetapi masih masuk dalam kategori cukup berhasil, yaitu skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan.

Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan tidak mencapai target yang diharapkan dengan tingkat capaian 55% atau cukup berhasil, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hal ini terjadi karena tidak tersedia data ekspor impor, selain itu disebabkan oleh masih rendahnya produksi komoditas pertanian yaitu umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan, kelompok bahan minyak dan lemak, buah dan biji berminyak juga komoditas pangan hewani. Untuk mengatasi masalah tersebut maka alternatif solusi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah dengan melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, seperti membahas masalah tersebut dalam rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai yang menghasilkan kesepakatan salah satunya yaitu meningkatkan skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan melalui peningkatan produksi



tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu alternatif solusi lainnya adalah dengan melibatkan analis pangan dalam penyusunan neraca bahan makanan (NBM).

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 16 menguraikan tentang analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019.

Tabel 16. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	8	9	10
1.	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman Serta Terjangkau Bagi Masyarakat (Sasaran Strategis)	Skor PPH Ketersediaan (IKU)	55	93.86	-38.86
		Skor PPH Konsumsi (IKU)	114.8	76.69	38.11
2.	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Ketahanan Pangan yang baik, bersih dan akuntabel (Non Sasaran Strategis)	Nilai Evaluasi AKIP (Non IKU)	88	82.48	5.52
		Persentase Peningkatan Disiplin ASN (Non IKU)	95	99.97	-4,95



Berdasarkan **tabel 16** dapat dilihat pada sasaran 1 yang merupakan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan yaitu Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman Serta Terjangkau Bagi Masyarakat dengan indikator skor pola pangan harapan ketersediaan tingkat efisiensi sebesar -38,86 karena prosentase capaian kinerja tidak mencapai 100% dan persentase anggarannya lebih besar dibandingkan persentase kinerja. Hal ini disebabkan karena 1) masih rendahnya produksi komoditas pertanian yaitu umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan, kelompok bahan minyak dan lemak, buah dan biji berminyak juga komoditas pangan hewani, 2) konsumsi pangan masyarakat didominasi oleh beras sehingga penyediaan bahan pangan beras paling tinggi dibandingkan 8 kelompok bahan pangan lainnya, 3) tidak tersedianya data ekspor impor, 4) Koordinasi lintas sektor dengan dinas-dinas terkait sektor pangan perlu untuk ditingkatkan agar produksi bahan pangan lain selain beras dapat ditingkatkan.

Untuk indikator skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi tingkat efisiensi 38,11 karena persentase capaian kinerja lebih dari 100 persen sedangkan persentase capaian penyerapan anggaran dibawah 100 persen.

Sasaran 2 merupakan sasaran non strategis yang merupakan dukungan manajemen Dinas Ketahanan Pangan yaitu meningkatnya tata kelola Dinas Ketahanan Pangan yang baik, bersih dan akuntabel dengan indikator nilai evaluasi AKIP efisiensi 5,52 karena meskipun persentase capaian kinerja tidak 100 persen tetapi lebih tinggi dari persentase penyerapan anggaran. Sedangkan untuk indikator persentase peningkatan disiplin ASN efisiensi -4,95 karena persentase penyerapan anggaran lebih tinggi dari persentase capaian kinerja.



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Berdasarkan data-data yang telah disajikan, diketahui bahwa dari dua indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan satu indikator pencapaiannya melebihi dari target yang ditetapkan atau sangat berhasil dan satu indikator tidak mencapai target tetapi masih dalam kategori cukup berhasil.

Sedangkan untuk indikator non IKU yang merupakan dukungan manajemen Dinas Ketahanan Pangan ada satu indikator dengan capaian 88% dan satu indikator dengan capaian 95%, kedua indikator tersebut masuk dalam kategori berhasil.

Adapun kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sebagai berikut:

- a. Indikator skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan, keberhasilan indikator kinerja utama ini di dukung oleh program peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan yang outputnya sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja ini adalah kegiatan pengembangan ketersediaan pangan, karena penyusunan dokumen neraca bahan makanan (NBM) ada di kegiatan ini, dari penyusunan NBM tersebut maka akan diketahui skor PPH ketersediaan. Selain itu kegiatan yang mempunyai daya ungkit terhadap keberhasilan pencapaian indikator ini adalah: kegiatan penanganan daerah rawan pangan, kegiatan penyusunan data base potensi produksi pangan, pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat, pemantauan dan analisis harga pangan pokok, pengembangan cadangan pangan daerah, pengembangan desa mandiri pangan, pengembangan lumbung pangan desa, pengembangan model distribusi pangan yang efisien, pengembangan sumber daya pangan, pengembangan ketersediaan pangan, dan pembangunan lumbung pangan.
- b. Indikator skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama ini di dukung oleh program



peningkatan ketahanan pangan, kegiatan yang outputnya sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja ini adalah kegiatan analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan, pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, pengembangan dan promosi produk pangan lokal, pengembangan usaha pangan lokal dan tradisional, peningkatan mutu dan keamanan pangan, peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan bahaya, dan peningkatan sistem informasi keamanan pangan. Sedangkan kegiatan gerakan penganeekaragaman pangan dan gizi tidak terealisasi 100% karena terkait kendala pembatasan penggunaan dana yang bersumber dana PAD sehingga kegiatan sosialisasi penganeekaragaman pangan dan gizi tahun 2019 dengan target 7 desa hanya terealisasi 2 desa.

- c. Indikator nilai evaluasi AKIP (Non Indikator Utama) yang merupakan dukungan manajemen Dinas Ketahanan Pangan, pencapaian target kinerja indikator kinerja tersebut dipengaruhi oleh program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program fasilitasi pindah/purna tugas PNS, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program pengembangan sistim informasi/data, program perencanaan umum dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk program peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah dan fasilitas Dewan Ketahanan Pangan tidak dapat terlaksana sehingga capaian kinerja 0% akibat adanya pembatasan penggunaan dana dengan sumber dana PAD dan DBH.
- d. Indikator presentase peningkatan disiplin ASN (Non IKU) yang merupakan dukungan manajemen Dinas Ketahanan Pangan, pencapaian target kinerja indikator kinerja tersebut dipengaruhi oleh program fasilitas pindah/purna tugas PNS dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.



B. REALISASI ANGGARAN DINAS KETAHANAN PANGAN

Dinas Ketahanan Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tupoksinya pada tahun 2019 memiliki alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 9.994.860.819,- yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.098.844.931,- dengan realisasi sebesar Rp.3.647.036.747,- atau mencapai 88,98%.
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 5.896.015.888,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.121.681.147,- atau mencapai 86,87%.

Secara keseluruhan realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.768.717.894,- atau mencapai 87,73%. Rincian alokasi dan realisasi anggaran sesuai belanja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2019 dapat dilihat pada **tabel 17**. berikut :

**Tabel. 17 Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019**

No.	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Tidak Langsung	4.098.844.931	3.647.036.747	88,98
2	Belanja Langsung	5.896.015.888	5.121.681.147	86,87
3	Total Belanja (1 + 2)	9.994.860.819	8.768.717.894	87,73

Secara lengkap pagu dan realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai tahun 2019 per kegiatan dapat di lihat pada **tabel 18**.



Tabel 18. Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	Anggaran berdasarkan DPPA Tahun 2018 (Rp)		Persentase (%)
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	79,331,087	946,544,840	96.65
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,400,000	2,400,000	100.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	74,040,000	60,710,278	82.00
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	58,120,000	57,820,000	99.48
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23,771,087	22,399,200	94.23
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,600,000	12,000,000	82.19
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3,000,000	3,000,000	100.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	22,000,000	18,480,000	84.00
8	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	261,000,000	260,935,362	99.98
9	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	206,000,000	206,000,000	100.00
10	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	314,400,000	302,800,000	96.31
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37,740,000	29,040,000	76.95
11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	24,000,000	24,000,000	100.00
12	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5,040,000	5,040,000	100.00
13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8,700,000	-	0.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LkJP 2019**
 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai



No.	Program/Kegiatan	Anggaran berdasarkan DPPA Tahun 2018 (Rp)		Persentase (%)
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5
	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	3,790,700	3,790,700	100.00
14	Pemulangan pegawai yang pensiun	3,790,700	3,790,700	100.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	174,780,000	165,244,000	94.54
15	Pendidikan dan pelatihan formal	13,000,000	13,000,000	100.00
16	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	136,800,000	127,274,000	93.04
17	Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	24,980,000	24,970,000	99.96
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	188,600,000	170,665,617	90.49
18	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,500,000	3,660,000	81.33
19	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	6,030,000	5,393,100	89.44
20	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3,780,000	3,779,200	99.98
21	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	94,290,000	87,583,417	92.89
22	Publikasi kinerja perangkat daerah	50,000,000	40,250,000	80.50
23	Penyusunan laporan inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	30,000,000	29,999,900	100.00
	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data	5,010,000	2,260,000	45.11
24	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	5,010,000	2,260,000	45.11

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LKJIP 2019**
 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai



No.	Program/Kegiatan	Anggaran berdasarkan DPPA Tahun 2018 (Rp)		Persentase (%)
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5
	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	72,938,800	34,417,000	47.19
25	Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	10,560,000	5,000,000	47.35
26	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	62,378,800	29,417,000	47.16
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	4,433,825,301	3,769,718,990	85.02
27	Penanganan Daerah Rawan Pangan	197,934,257	193,987,407	98.01
28	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	17,860,000	17,568,000	98.37
29	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	27,770,000	27,531,700	99.14
30	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	35,000,000	-	0.00
31	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	132,120,000	129,711,700	98.18
32	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	20,590,000	20,589,900	100.00
33	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	81,340,000	81,339,500	100.00
34	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	275,470,000	270,848,600	98.32
35	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	85,951,000	85,711,450	99.72
36	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	230,290,000	228,760,700	99.34
37	Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	54,000,000	53,923,700	99.86
38	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	159,000,000	88,269,125	55.52
39	Pengembangan Sumber Daya Pangan	134,200,000	133,310,474	99.34
40	Fasilitas Dewan Ketahanan Pangan	135,900,000	-	0.00
41	Gerakan Penganekaragaman Pangan dan Gizi	225,000,000	37,839,300	16.82



No.	Program/Kegiatan	Anggaran berdasarkan DPPA Tahun 2018 (Rp)		Persentase (%)
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5
42	Pengembangan dan Promosi Produksi Pangan Lokal	372,207,701	371,121,844	99.71
43	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Bahaya	140,000,000	139,371,404	99.55
44	Peningkatan Sistem Informasi Keamanan Pangan	100,000,000	99,496,300	99.50
45	Pengembangan Ketersediaan Pangan	122,659,843	117,657,343	95.92
46	Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional	192,572,000	140,994,335	73.22
47	Pembangunan Lumbung Pangan	1,693,960,500	1,531,686,208	99.12
		5,896,015,888	5,121,681,147	86.87

Dari **tabel 18**, dapat dilihat bahwa dari total alokasi belanja langsung sebesar Rp.5.896.015.888; terealisasi sebesar Rp. 5.121.681.147; atau sebesar 86,87 persen, beberapa hal yang menyebabkan penyerapan anggaran belum optimal adalah:

1. Keterlambatan transfer dana DBH ke daerah menyebabkan terjadi pembatasan kegiatan yang anggarannya bersumber dana DBH akibatnya kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi dana yang tidak tersedia.
2. Realisasi PAD yang tidak mencapai target menyebabkan terjadi pembatasan kegiatan yang anggarannya bersumber dana PAD, akibatnya kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia dana.

Alokasi anggaran per sasaran pembangunan bidang ketahanan pangan untuk mengetahui persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan/total anggaran dapat dilihat pada **tabel 19**.



Tabel 19. Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan Bidang Ketahanan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
					Keuangan	Persen tase
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman Serta Terjangkau Bagi Masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	2,914,255,600	2,735,383,282	93.86
			Penanganan daerah rawan pangan	197,934,257	193,987,407	98.01
			Penyusunan data base potensi produksi pangan	17,860,000	17,568,000	98.37
			Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	20,590,000	20,589,900	100.00
			Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	81,340,000	81,339,500	100.00
			Pengembangan cadangan pangan daerah	275,470,000	270,848,600	98.32
			Pengembangan Desa Mandiri Pangan	85,951,000	85,711,450	99.72
			Pengembangan lumbung pangan desa	230,290,000	228,760,700	99.34
			Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	54,000,000	53,923,700	99.86
			Pengembangan sumber daya pangan	134,200,000	133,310,474	99.34
			Pengembangan ketersediaan pangan	122,659,843	117,657,343	95.92
			Pembangunan Lumbung Pangan	1,693,960,500	1,531,686,208	90.42

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LkJP 2019**
 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
					Keuangan	Persen tase
1	2	3	4	5	6	7
		2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1,348,669,701	1,034,335,708	76.69
			Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	27,770,000	27,531,700	99.14
			Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	132,120,000	129,711,700	98.18
			Peningkatan mutu dan keamanan pangan	159,000,000	88,269,125	55.52
			Gerakan Penganeekaragaman pangan dan Gizi	225,000,000	37,839,300	16.82
			Pengembangan dan promosi produksi pangan lokal	372,207,701	371,121,844	99.71
			Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan bahaya	140,000,000	139,371,404	99.55
			Peningkatan Sistim Informasi Keamanan Pangan	100,000,000	99,496,300	99.50
			Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional	192,572,000	140,994,335	73.22

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LKIP 2019**
 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
					Keuangan	Persen tase
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Ketahanan Pangan yang baik, bersih dan akuntabel	1. Nilai Evaluasi AKIP (Non IKU)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	979,331,087	46,544,840	96.65
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,400,000	2,400,000	100.00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	74,040,000	60,710,278	82.00
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	58,120,000	57,820,000	99.48
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	23,771,087	22,399,200	94.23
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,600,000	12,000,000	82.19
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3,000,000	3,000,000	100.00
			Penyediaan Makanan dan Minuman	22,000,000	18,480,000	84.00
			Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	261,000,000	260,935,362	99.98
			Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	206,000,000	206,000,000	100.00
			Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	314,400,000	302,800,000	96.31
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37,740,000	29,040,000	76.95
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	24,000,000	24,000,000	100.00
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5,040,000	5,040,000	100.00
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8,700,000	-	0.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	149,800,000	140,274,000	93.64
			Pendidikan dan pelatihan formal	13,000,000	13,000,000	100.00
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	136,800,000	127,274,000	93.04

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LKJP 2019**
 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
					Keuangan	Persen tase
1	2	3	4	5	6	7
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	188,600,000	170,665,617	90.49
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,500,000	3,660,000	81.33
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	6,030,000	5,393,100	89.44
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3,780,000	3,779,200	99.98
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	94,290,000	87,583,417	92.89
			Publikasi kinerja perangkat daerah	50,000,000	40,250,000	
			Penyusunan laporan inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	30,000,000	29,999,900	100.00
			Program Pengembangan Sistem Informasi/Data	5,010,000	2,260,000	45.11
			Penyusunan Profil Perangkat Daerah	5,010,000	2,260,000	45.11
			Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	72,938,800	34,417,000	47.19
			Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	10,560,000	5,000,000	47.35
			Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	62,378,800	29,417,000	47.16
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	170,900,000	-	0.00
			Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	35,000,000	-	0.00
			Fasilitas Dewan Ketahanan Pangan	135,900,000	-	0.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LkJP 2019**
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
					Keuangan	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
		2. Persentase Peningkatan Disiplin ASN	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	3,790,700	3,790,700	100.00
			Pemulangan pegawai yang pensiun	3,790,700	3,790,700	100.00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	24,980,000	24,970,000	99.96
			Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	24,980,000	24,970,000	99.96



Perbandingan antara pencapaian kinerja dengan anggaran dapat dilihat pada **tabel 20.** dan **tabel 21.**

Tabel 20. Perbandingan Antara Pencapaian Kinerja Utama Dengan Anggaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman Serta Terjangkau Bagi Masyarakat	1 Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	90.1	49.55	55%	2,914,255,600	2,735,383,282	93.86%
		2 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	76.8	88.2	114.8%	1,348,669,701	1,034,335,708	76.69%

Tabel 21. Perbandingan Antara Pencapaian Kinerja (Non IKU) Dengan Anggaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Non IKU)	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3				5	6	7
1	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Ketahanan Pangan yang baik, bersih dan akuntabel	1. Nilai Evaluasi AKIP	BB	B	88%	1,166,871,087	1,115,858,840	95.63%
		2. Persentase Peningkatan Disiplin ASN	100%	95%	95%	28,770,700	28,760,700	99.97%



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai maupun target yang ditentukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan memperhatikan Visi dan Misi kepala daerah yang telah dijabarkan dalam program dan kegiatan, maka Dinas Ketahanan Pangan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) ini merupakan ruang pembuktian Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam tolak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh setiap instansi pemerintah khususnya di Dinas Ketahanan Pangan.

Berdasarkan Hasil evaluasi kinerja sasaran strategik, nilai capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Banggai pada Tahun 2019 satu indikator kinerja utama belum mencapai 100% tetapi masuk dalam kategori berhasil dan satu indikator lagi capaiannya sudah lebih dari 100% atau sangat berhasil.

Pencapaian kinerja skor PPH Ketersediaan hanya mencapai 55% masuk dalam kategori berhasil tetapi kinerja belum sampai 100%, hal ini bukan karena kinerja Dinas Ketahanan Pangan tidak optimal, tetapi untuk mencapai skor PPH Ketersediaan yang tinggi peran lintas sektor terkait pangan seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan, dan Dinas Perikanan, harus ditingkatkan karena berhubungan dengan produksi pangan yang sangat berpengaruh terhadap penghitungan skor PPH Ketersediaan.



Berikut ini adalah keberhasilan yang dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai selama tahun 2019 :

1. Berdasarkan Neraca Bahan Makanan, bahwa ketersediaan energi dan protein untuk masyarakat Kabupaten Banggai selama Tahun 2019 dalam jumlah yang cukup, yang artinya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan sebagian besar merupakan hasil produksi dalam wilayah Kabupaten Banggai.
2. Dinas Ketahanan Pangan telah mengadakan stok cadangan pangan pemerintah sebanyak 20 ton untuk memantapkan ketahanan pangan Kabupaten Banggai.
3. Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan intervensi ke daerah rawan pangan sehingga 7 desa telah berhasil keluar dari kategori rawan pangan prioritas 1 yaitu Desa Balai gondi, Desa Tampe, Desa Dolom, Desa Lambuli, Desa Lokait, dan Desa Maleo Jaya, Desa Kabua-bua.
4. Persentase keamanan pangan dan mutu pangan segar dan olahan sejak tiga tahun terakhir semakin meningkat yaitu di tahun 2017 sebesar 46,15%, tahun 2018 meningkat menjadi 69%, dan di tahun 2019 meningkat lagi menjadi 95,24% hal ini menunjukkan semakin baiknya tingkat keamanan pangan di Kabupaten Banggai.
5. Pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Banggai sudah mulai beragam ditunjukkan dengan skor PPH Konsumsi yang semakin meningkat selama tiga tahun terakhir 2017-2019 yaitu tahun 2017 hanya mencapai skor 75, meningkat di tahun 2018 menjadi 87,4, dan meningkat lagi di tahun 2019 dengan skor 88,2.
6. Pengembangan inovasi Dinas Ketahanan Pangan dengan dibangunnya kafe Laigan Loka yang menjual produk-produk pangan lokal untuk mengkampanyekan pangan lokal Kabupaten Banggai.



B. PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Pemerintah daerah Kabupaten Banggai telah mampu menyediakan pangan dan mendistribusikannya secara merata keseluruh daerah, sehingga pangan dapat dijangkau, tetapi belum menjadi jaminan bahwa seluruh penduduk Kabupaten Banggai pada tahun 2019 dapat memenuhi kebutuhan pangannya dalam jumlah yang cukup, bermutu, bergizi, berimbang, aman dan halal sebagaimana di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, permasalahan yang masih dihadapi adalah:

- a. Produksi bahan pangan lainnya seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan, kelompok bahan minyak dan lemak, buah dan biji berminyak juga komoditas pangan hewani perlu untuk ditingkatkan agar ketersediaan pangan di Kabupaten Banggai menjadi ideal.
- b. Masih banyak daerah rawan pangan prioritas 1-3 yang perlu untuk ditangani agar dapat keluar dari kategori rawan pangan;
- c. Pola konsumsi pangan masyarakat yang masih jauh dari ideal, dimana skor PPH baru mencapai 88,2 point yang mana skor PPH Konsumsi ideal adalah 100.
- d. Masih ada pangan segar, jajanan, dan pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya sehingga tidak aman untuk dikonsumsi.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan memerlukan dukungan dari berbagai sektor dan instansi terkait pangan. Dukungan tersebut antara lain adalah :

1. Peningkatan produksi tanaman khususnya tanaman pangan selain padi;
2. Peningkatan produksi komoditas hortikultura dan bimbingan teknis budi daya untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan;
3. Pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pengganti beras dan terigu;
4. Pelatihan bagi aparat , kelompok melalui penyuluh pertanian, serta penyuluhan di pedesaan;



5. Teknologi tepat guna untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan;
6. Penyediaan benih unggul dan bersertifikat untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
7. Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal;
8. Meningkatkan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal dilakukan melalui pengembangan bisnis pangan lokal bagi UMKM, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, pengembangan gerai atau outlet pangan lokal, pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal, dan memastikan peningkatan penganekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah.

Berbagai upaya dan tindak lanjut ke depan yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai, yaitu :

- 1) Meningkatkan dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perwujudan ketahanan pangan;
- 2) Meningkatkan peran eksekutif dan legislatif dalam penentuan kebijakan ketahanan pangan wilayah, serta peningkatan pemahaman daerah dalam pembangunan ketahanan pangan;
- 3) Keterlibatan swasta dalam teknologi pengolahan pangan lokal;
- 4) Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM aparatur, khususnya dalam pengembangan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan;
- 5) Mensinkronkan kebijakan pembangunan ketahanan pangan pusat dan daerah melalui berbagai upaya pemberdayaan masyarakat;
- 6) Mengembangkan sistem koordinasi dan pembinaan dalam pemupukan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat yang bersifat pokok sesuai pola pangan setempat, guna mengantisipasi terjadinya kasus rawan pangan kronis dan transien, serta mendukung stabilitas harga pangan pokok;



- 7) Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan dalam mengimplementasikan berbagai peraturan dan pedoman ketahanan pangan.
- 8) Untuk peningkatan ketahanan pangan dan mengatasi kerentanan pangan di wilayah Kabupaten Banggai dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal;
 - b. Pemanfaatan lahan pertanian dan pekarangan secara optimal;
 - c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan, pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, puskesmas), dan pemberian bantuan sosial, serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah;
 - d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih, sosialisasi dan penyuluhan;
 - e. Penyediaan tenaga kesehatan.
- 9) Meningkatkan peran dan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan daerah agar dapat tercipta koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder di bidang pangan, sehingga tercipta kondisi ketahanan pangan yang mantap.